

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam terciptanya sebuah negara, pemerintah dibutuhkan dalam segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, pembangunan, sosial, hukum maupun segala bentuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah atau bahkan desa. Dalam prinsipnya konsep pemerintahan yang baik atau *Good Governance* tidak akan pernah lepas dengan 3 sektor utama yaitu antara lain *state* (Negara atau Pemerintah), *Society* (masyarakat) *and Private Sektor* (sektor swasta atau dunia usaha) yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing secara beriringan. (sedarmayanti, 2012)

Dalam kondisi global pemerintah dituntut untuk selalu melihat dan memperhatikan situasi dan kondisi sekitar terkait dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh lingkungannya. Hal ini dilakukan sebagai wujud kesiapan pemerintah dalam menyikapi dan merespon berbagai bentuk permasalahan perkembangan global yang terjadi pada lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal apabila sewaktu-waktu mengalami perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Arus perkembangan globalisasi yang sangat cepat juga dapat menyebabkan banyak

sekali permasalahan terutama kesiapan dalam menerima perubahan tersebut secara bijak. Contohnya saja adalah tingkat pertumbuhan penduduk di kota yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada tingkat desa.

Melihat potensi-potensi lingkungan yang ada pada suatu daerah atau pada suatu wilayah memang harus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah secara ruang lingkup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan pada tingkat unit terkecil seperti halnya pemerintahan desa. bahkan dalam kasus-kasus tertentu pemerintah juga di perbolehkan untuk melakukan tindakan kerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan dalam upaya penanganan permasalahan publik yang ada. Kolaborasi atau kerjasama dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik secara individu atau perseorangan, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. (Haryono, 2012)

Kolaborasi yang dibangun antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat adalah salah satu wujud kerjasama atas kepedulian pemerintah terhadap segala bentuk kegiatan masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan kreatif. Sehingga dewasa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam melakukan sosialisasi, kontes maupun memberikan bantuan kepada sekelompok masyarakat maupun perorangan dalam pengelolaan kegiatan yang menunjang kemandirian masyarakat itu

sendiri dengan cara memberikan bantuan secara fisik maupun non fisik kepada kelompok swadaya masyarakat tersebut untuk mengembangkan usahanya. Tak jarang juga dari hasil kolaborasi tersebut dihasilkan output yang baik bahkan berhasil menjadi sebuah usaha yang selain dapat mensejahterakan kelompok yang bersangkutan, juga dapat menjadi sebuah kebanggan daerah dimana kelompok swadaya tersebut berada.

Dalam program nawacita yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi memang ada beberapa hal yang di fokuskan terutama dalam bidang pembangunan daerah dari pinggiran, dan pembangunan tersebut mengerucut dalam bidang perekonomian dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau masyarakat yang berada pada wilayah-wilayah terpinggir dan tertinggal yang masih belum memiliki akses dan fasilitas penunjang perekonomian yang layak, karena kita ketahui bahwa daerah-daerah pinggiran terutama daerah-daerah pedesaan yang dapat dikatakan untuk akses fasilitas publik yang pas-pasan dan minim, sehingga sering sekali untuk menunjang perbaikan perekonomian itu sangatlah sulit untuk dapat di lakukan secara efektif.

**Tabel 1.1****Penyedia Sarana dan prasarana Budidaya APBD DIY dan APBN Kabupaten Kulon Progo 2017**

NO	Nama Pokdakan	Alamat	Nama Paket	Jumlah Paket	Paket Yang Diterima				Sumber dana
					Plastik UV/ Imbr	Benih (ekor)	Pakan (Kg)	Jaring Pagar	
1	Sumber Iwak	Kijan, Demagrejo, Sentolo	Budidaya Lele	20	20	48.000	4.800		APBD DIY
2	Karya Mina	Kadipaten, Triharjo, Wates	Budidaya Lele	20	20	48.000	4.800		APBD DIY
3	Mina Tentrem	Cokrodipan, Wates	Budidaya Lele	20	20	48.000	4.800		APBD DIY
4	Mina Tani	Selong, Palihan Temon	Budidaya Lele	15	15	36.000	3.600		APBD DIY
5	Mina Surya Abadi	Seworan, Wates	Budidaya Lele	15	15	36.000	3.600		APBD DIY
6	Mina Handayani	Anjir, Hargorejo, Kokap	Budidaya Gurame	20	20	6.000	1.200		APBD DIY
7	Mina Bayu Lestari	Tonobakal, Hargomulyo, Kokap	Budidaya Gurame	10	10	3.000	600		APBD DIY
8	Mina Sejahtra	Lengkong, Nanggulan	Budidaya Gurame	5	5	1.500	300		APBD DIY
9	Mina Ngudi Lestari	Tegalsari, Nanggulan	Budidaya Gurame	5	5	1.500	300		APBD DIY
10	Marsudi Artha	Sadang, Nanggulan	Budidaya Gurame	5	5	1.500	300		APBD DIY
11	Mina Raharjo	Jati Ngarang Lor, Nanggulan	Budidaya Gurame	5	5	1.500	300		APBD DIY
12	Mina Jaya	Dusun IX, Kranggan, Galur	Mina Padi	1		400 (kg)	2.400	15	APBD DIY
13	Mina Makmur	Ngestiharjo, Wates	Mina Padi	1		400 (kg)	2.400	15	APBD DIY
14	Sido Kopen	Klegen, Pengasih	Mina Padi	1		400 (kg)	2.400	15	APBD DIY
15	Argo Mina	Sentolo lor, Sentolo, Sentolo	Budidaya Lele	1		40.000	3.500		APBN
16	Rukun Jaya	DusunIV, Penjatan, Penjatan	Budidaya Lele	1		40.000	3.500		APBN
17	Mioro Mino	Jogahan, Temon wetan, Temon	Budidaya Lele	1		40.000	3.500		APBN
18	Mina Surut Aji	Pencengan, Kedudang, Temon	Budidaya Lele	1		40.000	3.500		APBN
19	Mina Ngeremboko	Dukuh V Kujon Lor, Kranggan, Galur	Budidaya Lele	1		25.000	4.000		APBN

Diakses dari Website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo

<https://dkp.kulonprogokab.go.id/index.php> (pada tanggal 19 oktober 2018, pukul

21.00 wib)

Tabel diatas menunjukkan wujud perhatian pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya mendukung bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keinginan dalam melakukan inovasi pembudidayaan ikan secara aktif di seluruh kabupaten Kulon Progo. Kerjasama yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo dengan kelompok Pembudayaan Ikan (POKDAKAN) Mina Bayu Lestari yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang berkumpul atas hasil inisiasi atau prakarsa sendiri dari masyarakat padukuhan Tonobakal Desa Hargomulyo, kecamatan kokap.

Kelompok Mina Bayu Lestari adalah salah satu dari 19 kelompok budidaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang mendapatkan bantuan dana APBD DIY dari Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Kulon Progo. pada awal saat berdirinya kelompok ini, sebenarnya sudah adanya kemauan dan keinginan dari beberapa orang masyarakat dari Pedukuhan Tonobakal yang prihatin akan kehidupan masyarakat desa yang memiliki ketergantungan terhadap sektor pertanian, akan tetapi sektor pertanian yang ada disana tidak didukung dengan kualitas saluran irigasi yang baik, sehingga sering kali pada saat musim kemarau maka disana akan sangat kekeringan dan bahkan minim air sedangkan pada saat musim penghujan disana sering sekali

mengalami banjir. Selain itu hal yang menarik dari kelompok budidaya ini adalah prestasinya yang gemilang, karena sudah pernah juara 1 lomba kelompok budidaya ikan pada tingkat Kabupaten 2013, juara 1 lomba budidaya ikan pada tingkat Provinsi DIY 2014 dan kemudian mewakili Provinsi DIY untuk mengikuti lomba budidaya ikan yang diselenggarakan oleh kementerian pada tingkat nasional dan akhirnya mendapat juara 1 pada tingkat nasional pada tahun 2014-2015. Keberhasilan yang dilakukan oleh kelompok budidaya ikan gurame Mina Bayu Lestari ini juga tidak terlepas dari dukungan dan keterlibatan pemerintah sebagai aktor kolaborasi untuk memberdayakan masyarakatnya dengan upaya terjun langsung meninjau kegiatan masyarakat yang dilakukan.

Meskipun sudah ada wujud kerjasama yang dilakukan oleh dinas perikanan kabupaten Kulonprogo dan juga pemerintah desa Hargomulyo dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat. Akan tetapi wujud kerjasama atau kolaborasi ini masih ada saja masalah mendasar yang masih sering dilakukan antara lain adalah pola koordinasi yang masih belum jelas serta wujud apresiasi yang diberikan kepada kelompok-kelompok UKM sering kali tidak terlaksana secara baik dan tidak tepat sasaran. Selain itu, peran pihak swasta dalam proses kolaborasi ini juga masih sangat sedikit, hal ini terlihat pada tahap pelaksanaan kolaborasi sejauh ini pihak swasta hanya dilibatkan dalam proses akhir yaitu pada tahap penjualan hasil produksi yang dilakukan lewat peran pengepul ikan gurame atas hasil produksi ikan kelompok masyarakat budidaya ikan gurame di Desa Hargomulyo tersebut.

Dengan telah terlaksananya bentuk kolaborasi yang terjadi, maka peneliti akan mencoba melihat dan meneliti tentang bentuk *collaborative governance* serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses kolaborasi antar *stakeholder* yaitu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Masyarakat khususnya pengurus Kelompok Pembudidayaan Ikan Mina Bayu Lestari dan Pihak swasta yang di gandeng dalam hal ini Pengepul hasil produksi ikan dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pengembangan budidaya ikan gurame di desa Hargomulyo. Maka dari itu penelitian ini akan mencoba meneliti tentang bagaimana bentuk **“Pembudidayaan Ikan Dalam Perspektif *Collaborative Governance* (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari di Desa Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo)”**

## **I.2 Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana peran yang dilakukan masing-masing *Stakeholder* yaitu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pengepul Hasil Produksi ikan gurame di Desa Hargomulyo dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan gurame dalam perspektif *Collaborative Governance* ?
2. Bagaimana bentuk *Collaborative Governance* yang terjadi antara masing-masing aktor kolaborasi dalam menjalankan kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan model pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo dalam perspektif *collaborative governance* ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah, penulis ingin mengetahui peran yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* dalam program pembudidayaan ikan gurame antara pemerintah dengan kelompok budidaya ikan Mina Bayu Lestari dan aktor swasta yang terlibat di Desa Hargomulyo, Kabupaten Kulon Progo.
2. Tujuan kedua, penulis ingin mengetahui bentuk *collaborative governance* yang terjadi antara masing-masing stakeholder yaitu antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon progo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dilihat dari sudut pandang perspektif *collaborative governance*.

### **I.4 Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu antara lain :

#### a) Manfaat Teoritis

Untuk melihat dan mengukur terkait peran pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan *Collaborative Governance* antara pemerintah dengan pihak-pihak lain seperti di luar pemerintahan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat lewat kegiatan pembudidayaan ikan gurame di sekitar wilayah Kabupaten Kulon Progo.

b) Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat terkait *Collaborative Governance* yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Kulonprogo khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kelompok Pembudidayaan Ikan (POKDAKAN) Mina Bayu Lestari melalui kegiatan pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo.

### **I.5 Tinjauan Pustaka**

Pembahasan tentang *Collaborative Governance* dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dan sangat unik untuk dijadikan topik penelitian lebih lanjut. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang konsep *Collaborative Governance* terlebih dahulu dengan berbagai masalah yang terjadi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain yang ada di beberapa daerah di Indonesia antara lain sebagai berikut :

Dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis *Stakeholders Collaborative Governance* (Studi kasus di kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara)”. pada penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Laksono dkk tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana mekanisme pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. dalam penelitian tersebut ditemukan *pertama*, peneliti menemukan problem pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan yang masih banyak sekali

seperti TKI ilegal dan *human trafficking*, perdagangan Narkoba dan OHP (*Outstanding Border Problem*). Serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang belum cukup memadai. *Kedua*, dalam penelitian ini ditemukan puluhan lembaga pemerintah sebagai *stakeholders* dalam upaya pengelolaan kawasan perbatasan seperti kementerian, pemerintah daerah, lembaga pemerintah/ non-pemerintah, TNI/Polri yang memiliki tugas masing-masing dan pihak-pihak swasta yang terdiri dari perusahaan, maupun perorangan, LSM dan lapisan masyarakat yang peduli akan perbatasan. *Ketiga*, *share vision* antara *stakeholders* yang masih belum maksimal untuk dilakukan sehingga belum ada dampak-dampak yang terlihat dalam upaya mengatasi problem di perbatasan. *Keempat*, partisipasi masyarakat dengan pihak swasta meskipun belum optimal untuk dilakukan akan tetapi sudah ada partisipasi masyarakat dalam mengatasi problem di wilayah perbatasan. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk *collaborative governance* yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada wilayah perbatasan sudah mulai terjalin secara baik, akan tetapi belum adanya inovasi yang dapat memberikan dampak yang atas solusi permasalahan perbatasan. (sulaksono, Suswanta, & Efendi, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Trisuma Dewi salah satu mahasiswa program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam Tesis nya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Industri Kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukan

reyog di kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dalam proses pengumpulan data menggunakan tahap wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini membahas beberapa masalah utama dalam implementasi penerapan *collaborative governance* antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga yang mengalami kemunduran dalam beberapa pola kerjasama antara lain: *pertama*, dalam kolaborasi penyediaan modal dan pembinaan yang dilakukan antara pengerajin reyog dengan pihak pemerintah, *kedua*, tindakan penyuluhan atau sosialisasi terkait bahan baku pembuatan kerajinan reyog, *ketiga*, kurangnya komitmen dan kepercayaan masing-masing *stakeholders* antara pemerintah dan pengrajin reyog dalam kegiatan-kegiatan festival reyog nasional, dan *keempat*, masih kurang berjalan secara baik hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya membantu mempromosikan hasil dari kerajinan reyog yang ada di ponorogo pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian bentuk *collaborative governance* antara pemerintah kabupaten Ponorogo dan masyarakat pengrajin reyog, dapat dikatakan belum berjalan secara baik. Hal ini terbukti dengan masih kurangnya perhatian pemerintah terdapat unit kegiatan industri masyarakat khususnya industri kerajinan reyog. (Dewi, 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Raja Ali Haji, yaitu Eki Darmawan dan Nazaki, yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Perencanaan Pembangunan: Partisipasi Masyarakat dan

Pemerintah dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif, dalam penelitian ini proses pengumpulan data informasi dilakukan menggunakan tahap wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan dilapangan, diantaranya *pertama*, dalam kegiatan pembuatan kebijakan seperti forum musrembang yang tidak secara umum dapat dihadiri oleh seluruh *stakeholders* terkait, *kedua*, masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di di masing-masing daerah, khususnya di daerah kepulauan riau, dan yang *ketiga*, belum terjalinnya hubungan sinergisitas antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, masyarakat dan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi yang membuat terkadang pembangunan daerah masih seret akan kegiatan politisasi dan korupsi. Selain itu inovasi yang dilakukan dalam upaya pembangunan masih belum menuju kepada tingkat kebutuhan pembangunan secara umum seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi. (Darmawati & Nazaki, 2015)

Penelitian ini juga membahas tentang penerapan *Collaborative Governance* di Indonesia. Dalam penelitian tersebut membahas tentang “Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif *Collaborative Governance* (studi pariwisata-bencana volcano tour merapi di kabupaten Sleman)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dalam proses pengumpulan data menggunakan tahap wawancara, diskusi kelompok dan dokumentasi. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil

bahwa dalam proses *collaborative governance* yang terjadi pada pengelolaan pariwisata volcano tour merapi memang sudah terjalin, akan tetapi kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan cenderung kepada hubungan yang bersifat adaptif untuk memenuhi kebutuhan sesaat, hubungan yang terjalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat masih cenderung dalam kondisi sedang atau formalitas sedangkan hubungan yang terjalin antara pihak swasta dengan masyarakat yang masuk kedalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang terbentuk antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata belum cukup terjalin secara baik, meski demikian usaha pengembangan wisata tour pengelolaan pariwisata volcano tetap berjalan secara baik sebab adanya hubungan solid yang terjadi antara pihak swasta dengan masyarakat sekitar. Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan tesis bahwa *collaborative governance* dalam konteks pariwisata-bencana mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi dan dari *shared vision* menuju kemitraan. (Zainuri, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Prouwati dalam skripsinya yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Program Kampung Ukm Digital Kabupaten Bantul Tahun 2016 (studi kasus sentra kerajinan batik kayu krebet, kecamatan pajangan, kabupaten bantul)”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa bentuk *collaborative governance* yang terjadi pada program kampung UKM Digital dipengaruhi oleh *starting condition*, *facilitative leadership*, *share understanding*, dan *collaborative process* dalam proses pelaksanaan kolaborasi antar stakeholder. Temuan dilapangan juga menunjukkan hasil dari kegiatan program kampung UKM Digital sudah dilakukan pemasangan di 6 titik hotspot yang tersebar pada wilayah-wilayah strategis oleh PT. Telkom, selain pemasangan hostpot wujud kegiatan kolaborasi juga tampak dengan telah telaksananya pelatihan-pelatihan dan terwujudnya peningkatan jumlah produktifitas kerajinan dengan omset penjualan dari hasil kerajinan tersebut. Sehingga dalam penelitian tersebut terlihat bahwa bentuk kolaborasi pemerintahan yang terjalin sudah cukup baik dan maksimal dilakukan antara pihak pemerintah kabupaten bantul, pihak PT Telkom (swasta) dan kerjasama masyarakat daerah sekitar yang antusias dan berkeinginan untuk maju. (Probowati, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen dari salah satu kampus swasta di Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Manajemen Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis *Collaborative Governance* (studi tentang manajemen kebijakan APBD tahun anggaran 2015 di kota Malang)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, FGD dan dokumentasi. Bentuk *Collaborative governance* dalam penelitian ini adalah adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan penyusunan APBD, dalam penelitian

tersebut dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat kota malang dalam penyusunan RAPBD untuk kemudian dijadikan APBD masih sangat minim, sehingga APBD kota malang sering kali salah sasaran dan tidak berpihak kepada pembangunan kota malang. Kurang baiknya bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat selain di pengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat kota malang, faktor penghambat lain juga terdapat pada kurang terbukanya pemerintah kota malang dalam mengarahkan dan mengajak masyarakat kota malang untuk aktif dalam kegiatan musyawarah penyusunan APBD. Hal ini juga dipengaruhi karena adanya kepentingan yang besar para elit-elit politik di kota malang yang masih tinggi. (Jainuri, 2016)

Penelitian yang berjudul “Analisa Kritis Atas Motif *Policy Community* Dalam Kolaborasi (studi kasus kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini bentuk *Collaborative Governance* yang terjadi adalah pada pola hubungan antara pemerintah provinsi Lampung dengan masyarakat dan antara pemerintah provinsi lampung dengan *policy comunity* dalam upaya kolaborasi pemindahan pusat pemerintahan provinsi Lampung yang dapat berjalan secara baik meskipun pada dasarnya memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini juga di jelaskan bahwa bentuk keberhasilan *collaborative governance* di titik beratkan kepada kesamaan ide atau gagasan yang dapat menyatukan para

kolaborator yang terlibat dalam upaya pemindahan pusat pemerintahan provinsi lampung, selama kepentingan para kolabolator tersebut nantinya masih dapat terpenuhi dan terealisasi secara baik. (Mukhlis, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Lukito dan Aris Tri Haryanto dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon di Kecamatan Serengan Kota Surakarta”. Merupakan jenis penelitian kualitatif yang kemudian proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian di temukan bentuk *collaborative governance* yang terjadi antara pihak pemerintah, bank, pengrajin dan paguyuban yang terjalin secara cukup baik dalam bentuk kepercayaan antara satu dengan lainnya tanpa adanya penjanjian atau bentuk kerjasama tertulis antara satu pihak dengan pihak lainnnya, sehingga kolaborasi yang terjadi tidak memiliki jadwal yang jelas sehingga antara pihak swasta, pemerintah dan pengrajin blangkon di kecamatan seragen tidak ada pihak yang mendominasi atau didominasi, karena hanya mengandalkan kepercayaan dan juga jaringan (*network*). Akan tetapi meskipun demikian antara pemerintah dan pihak swasta (bank) memiliki modal dan SDM yang dapat dikatakan lebih dari cukup dalam menjalankan usaha kerajinan blangkon sedangkan pihak paguyuban dan pengrajin tidak memiliki SDM dan modal yang cukup dan bahkan dapat dikatakan minim. (Lukito & Haryanto, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko dan Moh. Imron yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penguatan

Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini didapat dari proses diskusi kelompok dan wawancara kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan topik masalah pembahasan. Dalam penelitian ini ditemukan bentuk *collaborative governance* antara pemerintah Kabupaten Banyumas dengan KSM atau kelompok swadaya masyarakat dalam upaya kolaborasi menciptakan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat ternyata masih belum dapat berjalan secara maksimal untuk dilakukan, kendala utama dalam pelaksanaan program SLBM tersebut salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program SLBM yang masih bersifat *top-down* atau masih dalam tahap intruksi atasan (pemerintah) tidak dari inisiatif masyarakatnya atau *bootom-up* sehingga pelaksanaan SLBM di Kabupaten Banyumas tidak dapat dijalankan secara kolaboratif. Selain tingkat partisipasi masyarakatnya yang masih kurang, peran LSM atau KSM dan pemerintah Kabupaten Banyumas masih belum mampu untuk mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program SLBM. (Kurniasih, Setyoko, & imron, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Minarti Harahap, Achmad Fahrudin dan Yusli Wardianto tentang penelitian yang berjudul “Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pengumbahan Kabupaten Sukabumi (*Collaborative Management of Sea Turtle Pengumbahan Marine Protected Area, Sukabumi District*)” penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif yang dimana dalam proses

pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan juga menyebarkan kuisisioner kepada responden yang berkaitan erat dengan topic penelitian, seperti nelayan, tokoh masyarakat, pemerintah, dan pengunjung yang datang serta *stakeholder* yang terkait dengan kawasan konservasi tersebut. Dari seluruh sample yang diambil kemudian didapatkan data jumlah keseluruhan sebanyak 140 responden yang kemudian dihasilkan data yang menyimpulkan bahwa bentuk *collaborative governance* yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi penyusutan pengubahan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari hasil kuisisioner yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait yang ada di sekitar kawasan observasi yang berperan aktif dalam menjaga kawasan konservasi sesuai dengan perannya masing-masing. Variable persepsi *stakeholder* dan kebijakan pemerintah daerah terkait kawasan konservasi penyusutan pengubahan merupakan indikator utama dalam penyebab keberhasilan tingkat kolaborasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut. (Harahap, Fahrudin, & Wardiyatno, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Beti Nur Hadati & Suparjan dalam penelitiannya yang berjudul “Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program CSR Batik Cap Pewarna Alami di PT. Semen Gresik Pabrik Tuban”. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dalam proses pengumpulan datanya menggunakan proses wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sasaran atau target kemitraan yang akan terjalin adalah kepada

dua desa yang ada di daerah tuban, tepatnya di Desa Gaji dan Karanglo yang masing-masing dibutuhkan pemberdayaan masyarakat (wanita) di masing-masing desa 10 orang untuk diberdayakan dan dilatih dalam pembuatan batik cap pewarna alami. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak perusahaan menjalin kemitraan bersama salah satu lembaga swadaya masyarakat yaitu (KPR) atau Koalisi Perempuan Ronggolawe untuk mencari 20 orang yang akan dilakukan pembinaan dan pelatihan pembatikan. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan pola hubungan yang terjadi dalam kegiatan kolaborasi antara perusahaan milik BUMN dan masyarakat yang memperoleh pelatihan sudah berjalan secara baik karena masing-masing *stakeholder* mendapatkan keuntungan dari kegiatan kemitraan tersebut, terutama pada kalangan masyarakat yang diuntungkan karena dapat menambah ilmu atau wawasan serta keterampilan dalam proses pembuatan batik cap pewarna alami sehingga kedepannya dapat menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik di daerah tuban. (Hayati & Suparjan, 2017)

Penelitian yang berjudul “Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengolahan Pariwisata Dari *Adaptive Governance* menuju *Collaborative Governance*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang perubahan paradigma pengolahan pariwisata dari *adaptive governance* menuju *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sleman. Dalam penelitian ini peneliti dijelaskan secara singkat tentang

peran pemerintah untuk mewujudkan sebuah kolaborasi bukan hanya dengan bantuan pihak-pihak insvestor (swasta) akan tetapi untuk menunjang terwujudnya *collaborative governance* adalah dengan keterlibatan masyarakat didalamnya sama-sama membantu mewujudkannya. Dalam penelitian ini juga disimpulkan bahwa sinergisitas antar pemerintah, swasta dan masyarakat sudah berjalan cukup baik sampai saat ini, akan tetapi ada beberapa kekurangan yang harus di perbaiki yaitu pada dominasi pemerintah kabupaten sleman yang masih kurang kuat dalam memberikan kebijakan dan kontroling kegiatan pariwisata bencana tersebut, sehingga kolaborasi yang terjadi lebih kearah pihak insfestor (swasta) dengan masyarakat sekitar saja. (Zainuri, 2014)

Penelitiannya yang berjudul “Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kali ini dijelaskan secara singkat kolaborasi yang terjadi antara pemerintah desa dengan lembaga adat yang ada di sekitar desa dalam upaya pelestarian kearifan lokal seperti amanah undang-undang desa No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa dan desa adat dirasa masih sangat kurang, karena beberapa faktor *pertama*, komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga adat masih jarang dilakukan; *kedua*, kurangnya kepercayaan pemerintah desa dengan lembaga adat dalam upaya pelestarian kearifan lokal, *ketiga*, adanya dominasi

pemerintah desa dalam setiap pengambilan keputusan atas pelestarian kearifan lokal Desa Bandar Picak, *Keempat*, kurangnya pengetahuan lembaga adat dalam kegiatan atau proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang di ambil sering kurang tepat sasaran. Yang terakhir adalah kurang terjalinnya hubungan *collaborative governance* yang terjadi secara baik antara lembaga adat dengan pemerintah desa, sehingga sering terjadi kesalah pahaman pandangan dan pendapat antara kedua belah pihak. (Azlin, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh T. Anisa Putri tentang “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berbentuk deskriptif kualitatif yang dimana proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini bentuk *collaborative governance* yang dilakukan adalah tentang peran pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat Provinsi Riau dalam upaya penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada tahun 2015-2016. Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan data bahwa kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah provinsi Riau belum berjalan secara efektif, dalam penelitian tersebut di buktikan dengan belum banyaknya program-program pendukung dan program-program penunjang kegiatan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi khususnya dinas pendidikan dan dinas sosial kemasyarakatan dengan masyarakat secara berkelanjutan atau berdampingan. Kurangnya kolaborasi dalam

proses penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini di dasari atas belum tumbuhnya kesadaran masyarakat dan belum adanya perhatian khusus pemerintah secara penuh untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak disabilitas. (Putri, 2017)

Penelitian tentang bentuk *Collaborative Governance* juga pernah dilakukan di kota Surabaya dengan judul penelitian “*Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintah Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana proses pengumpulan data menggunakan tahap wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dihasilkan temuan bahwa dalam proses *collaborative governance* yang terjadi dalam upaya pengendalian pencemaran udara di kota Surabaya melalui 3 tahapan yaitu: *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, dan Planing Collaborative Actions* dapat dikatakan belum berjalan secara efektif untuk dilakukan. Hal ini disebabkan atas beberapa faktor utama yaitu belum sadar sepenuhnya masyarakat akan bahaya pencemaran dan pentingnya hidup sehat, kurang masifnya program dan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan polusi udara di kota Surabaya. Masih kurangnya keterlibatan *stakeholders* lain didalam forum kolaborasi yang dilakukan dan yang terakhir adalah masih kurangnya ketersediaan sumber keuangan yang masih belum mencukupi sehingga untuk menciptakan sebuah kebijakan dan kolaborasi didalamnya

masih mengalami banyak sekali kendala dan dapat dikatakan belum sempurna. (Irawan, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muqorobin Ist, yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Belitar”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk *collaborative governance* pada penelitian ini dirasakan belum berjalan baik. Beberapa faktor utama yaitu antara lain diukur dari indikator dinamika kolaborasi yang dirasa masih sering terjadi miss komunikasi dan belum tercipta sepenuhnya kepercayaan antara *stakeholders* terkait dalam pengendalian penyakit TB-HIV di kota belitar, indikator tindakan-tindakan kolaborasi dari penelitian tersebut meskipun telah dilakukan beragam bentuk kegiatan kolaborasi akan tetapi belum bisa berjalan secara baik, hal ini sinkron dengan indikator sebelumnya tentang dinamika kolaborasi yang masih belum bisa dilakukan secara baik, dan yang terakhir adalah indikator dampak sementara dan adaptasi pada proses kolaborasi yang dapat dikatakan sudah mulai terbentuk akan tetapi kembali lagi pada beberapa indikator sebelumnya yang masih belum berjalan secara maksimal, sehingga indikator sementara dan adaptasi didalam proses kolaborasi yang masih belum terbentuk. (Ist, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Djamaludin yang berjudul “Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Udang (Studi Kasus di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini pola atau bentuk *collaborative governance* yang terjadi secara singkat telah dipaparkan sebagai berikut antara lain :

- a) proses kolaborasi yang dilakukan multi stakeholder berlangsung pada tingkat sub local, local dan supra lokal yang dimana kolaborasi tersebut melibatkan petani tambak, kelompok tambak, LSM, perguruan tinggi, pemerintah dan pelaku usaha (swasta);
- b) kolaborasi multi stakeholder yang terjadi dalam pengembangan kawasan minapolitan menjadi kawasan berbasis udang menambah peningkatan partisipasi masyarakat disekitar wilayah dalam berbagai kegiatan seperti partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi kegiatan stakeholder di kawasan minapolitan;
- c) keberhasilan kolaborasi multi stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis udang di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, jika diukur dalam segi ekonomi mengalami, kolaborasi multi stakeholder terbukti mengalami peningkatan, selain itu jika di tinjau dalam aspek sosial, sampai sejauh ini frekuensi konflik atas hasil yang didapatkan para petambak udang hamper tidak ada dan untuk aspek lingkungan sudah mulai adanya kesadaran petani pembudidayaan udang secara ramah lingkungan dan berkelanjutan sebab tambak

udang belum sepenuhnya menggunakan pupuk alami dan tambak intensif masih belum memiliki instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Sehingga dalam penelitian tersebut dalam segi *Collaborative Governance* yang terjadi sudah berjalan dengan sangat baik. (Djamaludin, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi tentang *collaborative governance* yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang”. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan proses pengumpulan data dengan proses wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dihasilkan temuan bahwa bentuk *collaborative governance* dalam upaya penyelesaian krisis listrik di kota tanjung pinang sudah cukup baik untuk dilakukan, hal ini secara singkat telah dibuktikan dengan sudah terjalannya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder di kota tanjung pinang baik dari pihak pemerintah, DPRD kota Tanjung pinang, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa maupun dari pihak perusahaan listrik. Kendala utama justru hadir dari masalah eksternal yaitu berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh PLN cabang kota Tanjung pinang yang tidak memiliki instruksi penuh atas masalah kelistrikan dan yang memiliki wewenang penuh adalah PLN pusat. Sehingga PLN cabang hanya bisa memberikan rekomendasi sedangkan keputusan tertinggi diserahkan kepada PLN pusat, sementara kendala kedua adalah masalah kewenangan pemerintah daerah dalam hal kelistrikan, karena masalah kelistrikan adalah wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepulauan riau, sehingga

pemerintah kota tanjung pinang tidak memiliki kewenangan penuh dalam menangani kerisis kelistrikan. Sehingga dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yang menarik yaitu sudah adanya kerjasama antar *stakeholder* dalam upaya penanganan masalah kerisis listrik di kota tanjung pinang dengan cara berkolaborasi mencari titik masalah dan solusi atas hasil masalah yang mereka hadapi. (Junaidi, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Hari Rujito dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Modal Ekonomi Desa Konservasi dan Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dalam proses pengumpulan data menggunakan data dari kuisioner yang diambil dari responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa aspek terpenting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kawasan TNTB dihasilkan urutan sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan masyarakat 24%, 2) pelibatan masyarakat ke dalam rehabilitas kawasan 21%, 3) pengembangan usaha milik masyarakat 20%, 4) kekuatan program pendampingan 20%, 5) peningkatan kapasitas masyarakat 19%. Dalam penelitian tersebut juga dihasilkan bahwa efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNMB untuk wilayah kabupaten banyuwangi menunjukkan telah berjalan dengan baik (dengan rata-rata nilai responden sebanyak 3,46 dengan skala 1-5); sedangkan wilayah Jember pencapaiannya sedang-sedang saja (dengan nilai rata-rata responden 33,12). Sedangkan untuk wilayah desa dengan jumlah pemberdayaan ekonomi masyarakat paling baik adalah desa Sarongan dan

Rajegwesi yang kegiatannya terkait dengan ekowisata (4,16 untuk skala 1-5); sedangkan untuk wilayah jember desa yang pencapaian kegiatan pemberdayaan cukup baik adalah desa MDK Wonosari (3,78 untuk skala 1-5) dan sedangkan desa yang mendapat capaian hasil relative rendah pemberdayaan masyarakat dan masih sangat perlu dilakukan peningkatan adalah desa Sonenrejo (dengan nilai rata-rata 2,52) dan desa Andongrejo (nilai rata-rata 2,71). (Rujito, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Udiani dengan judul penelitian “Kolaborasi Perencanaan (Studi Kasus pengembangan UMKM di Kabupaten Maros)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Udiani ini membahas tentang kolaborasi perencanaan yang terdapat di kabupaten maros. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kolaborasi antara Koperidang dengan PT. Angkasa Pura I telah berjalan secara optimal dan baik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kelangsungan proses kepemimpinan antara kedua *stakeholder* sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan komunikasi, masing-masing pihak yang memiliki kekuatan atau power sudah saling membantu, kolaborasi yang dilakukan selama ini tidak ada unsur paksaan atau desakan akan tetapi karena unsur kepentingan kedua belah pihak, adanya laporan yang diberikan berupa regulasi dan penunggaan untuk mewujudkan sebuah bentuk laporan pertanggung jawaban sesuai dengan aturan atau landasan hukum yang telah ditetapkan. (Udiani, 2016)

**Tabel 1.2**

Literatur Review

<i>Collaborative Governance Pemanfaatan Lingkungan</i>				
NO	Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muchamad Zainuri (2014)	Mengelola Pariwisata-Bencana: Perubahan Pengolahan Pariwisata Dari <i>Adaptive Governance</i> menuju <i>Collabobarive Governance</i>	Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.	Penelitian ini mejelaskan tentang perubahan paradigma pengolahan pariwisata dari <i>adaptive governance</i> menuju <i>collaborative governance</i> yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sleman, khususnya pada daerah sekitar lereng merapi. Dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat tentang peran pemerintah dalam mengembalikan perekonomian masyarakat kabupaten Sleman lewat pengelolaan wisata bencana dengan melibatkan peran swasta, masyarakat dan pemerintah kabupaten sleman tentunya.
2	Muchamad Zainuri (2016)	Tatakelola Pariwisata-Bencana dalam Perspektif <i>Collaborative Governance</i>	Penelitian Kualitatif (Wawancara,	<i>Collaborative governance</i> dalam pengelolaan pariwisata-bencana vulkano tour merapi dalam hal ini terwujud dengan peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata-bencara dengan

		(studi pariwisata bencana Vulkano tour merapi di kabupaten Sleman)	Diskusi Kelompok dan Dokumentasi)	konsep pembangunan daerah telah terlaksana secara baik. Dalam penelitian ini juga di jelaskan tentang bentuk <i>collaborative governance</i> dalam konteks pariwisata-bencana di kabupaten Sleman telah mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat informal menjadi hubungan formal, dari komando menuju kolaborasi dan dari hubungan <i>share vision</i> menuju hubungan kemitraan.
3	Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko & Mohamma d Imron (2017)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas.	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan Diskusi Kelompok)	<i>Collaborative governance</i> antara pemerintah dan masyarakat dalam penelitian ini terletak pada pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat yang masih bersifat <i>top-down</i> sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan belum memahami maksud kegiatan program yang dilakukan. Selain itu peran pemerintah dan KSM kabupaten Banyumas juga dirasa belum ada inisiatif untuk terjun kelapangan dan menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham akan kegiatan program SLBM di kabupaten Banyumas tersebut.
4	Irma Minarti Harahap, Achmad	Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pengumbahan Kabupaten Sukabumi ( <i>Collaborative</i>	Jenis penelitian komparatif pengabungan data kualitatif dengan	Sebanyak 140 responden diminta untuk mengisi kuisioner terkait pengelolaan kawasan konservasi penyu di kabupaten Sukabumi. Hasilnya banyak dari responden yang beranggapan positif atas pengelolaan kawasan konservasi penyu pengumbahan. Hal ini terjadi dari karena

	Fahrudin & Yusli Wardiyatno (2015)	<i>Management of Sea Turtle Pengumbahan Marine Protected Area, Sukabumi District</i>	data kuantitatif (Wawancara dan kuisisioner kepada 140 responden )	adanya wujud <i>collaborative governance</i> yang dilakukan antar stakeholder untuk menjaga dan merawat kawasan konservasi, hal ini dibuktikan oleh peneliti dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan aktor-aktor kolaborasi berperan aktif sesuai dengan fungsinya secara bersama-sama untuk menjaga kawasan konservasi.
5	Danni Irwan (2017)	<i>Collaborative Governance</i> (Studi Deskriptif Proses Pemerintah Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)	Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi)	<i>Collaborative governance</i> yang terjadi dalam upaya pengendalian pencemaran udara di kota Surabaya melalui 3 tahapan yaitu: <i>Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies For Influence, dan Planing Collaborative Actions</i> dapat dikatakan belum berjalan secara efektif untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, peran pemerintah yang belum secara masif dilakukan dan kesiapan anggaran pembiayaan pemerintah dalam mengurangi polusi yang etrjadi di Surabaya.
6	Djamaludin (2017)	Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Udang (Studi	Penelitian kualitatif (Observasi, Dokumentasi dan Wawancara).	Pola hubungan <i>collaborative governance</i> yang terjadi pada penelitian ini sudah baik untuk dilakukan hal ini karena kolaborasi yang dilakukan sudah adanya keterlibatan petani tambak, LSM, Perguruan tinggi sebagai peneliti kelayakan air, lingkungan dan keadaan wilayah, pemerintah sebagai pengontrol kegiatan pengembangan dan pelaku usaha (swasta) dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

		Kasus di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).		dalam upaya pengembangan kawasan minopolitan berbasis Udag di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
<b><i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan UMKM</b>				
<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
7	Ratna Trisuma Dewi (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (studi kasus tentang kerajinan reyog dan pertunjukan reyog di kabupaten Ponorogo	Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi)	Dalam penelitian ini ditemukan beberapa masalah utama atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan <i>collaborative governance</i> sehingga kolaborasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dikatakan belum sempurna dilakukan. <i>pertama</i> , dalam kondisi kolaborasi penyediaan modal dan pembinaan, <i>kedua</i> , kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang kurang intensif dilakukan, <i>ketiga</i> , masih kurangnya komitmen dan kepercayaan antar stakeholder, <i>keempat</i> , kurang terjalinnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pelaku usaha.
8	Indri Probuwati (2018)	Collaborative Governance Dalam Program Kampung UKM Digital Kabupaten Bantul Tahun 2016 (studi	Penelitian Kualitatif (Wawancara, dan Dokumentasi)	<i>Collaborative governance</i> yang dilakukan pada program UKM Digital di kabupaten Bantul. Bentuk kolaborasi yang dilakukan pada program inovasi baru tersebut di pengaruhi oleh <i>starting condition</i> , <i>facilitative leadership</i> , <i>share understanding</i> dan <i>collaborative process</i> sehingga

		kasus sentra kerajinan batik kayu krebet, kecamatan Pajangan, kabupaten Bantul)		dalam proses pelaksanaannya sudah berjalan baik. Temuan dilapangan juga menunjukkan bawa output dari hasil program UKM Digital di kabupaten Bantul telah merubahan kondisi masyarakat terutama dilihat dari segi ekonomi telah mengalami peningkatan karena adanya pelaksanaan program UKM digital dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat untuk peningkatan kerajinan batik kayu krebet.
9	Lukito & Aris Tri Haryanto (2016)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon di Kecamatan Seragen Kota Surakarta	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan Dokumentasi)	Menariknya dalam penelitian ini, bentuk kolaborasi antar stakeholder dapat dilihat pada pola kepercayaan dan komitmen tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga dalam <i>collaborative governance</i> antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat akan terus terjalin secara baik apabila masing-masing stakeholder masih mendapatkan keuntungan yang stabil dalam pelaksanaan pengembangan kerajinan belangkon di secamatan Seragen kota Surakarta. Sehingga dapat dikatakan wujud kolaborasi yang terjadi hanyalah sebatas rekan bisnis.
10	Nani Udiani (2016)	Kolaborasi Perencanaan (Studi Kasus pengembangan UMKM di Kabupaten Maros)	Jenis penelitian kuantitatif (Wawancara dan Dokumentasi)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum bentuk <i>collaborative governance</i> antara Koperidang dengan PT. Angkasa Pura I dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Maros telah berjalan secara optimal dan baik. Hal ini terbukti dengan terjalin secara baiknya hubungan antara masing-masing aktor dalam upaya penyelenggaraan

				pengembangan UMKM yang tak lupa juga melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya.
<b><i>Collaborative Governance</i> Pengelolaan daerah Perbatasan</b>				
<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
11	Tanjung Sulaksono, Suswanta dan David Evendi (2017)	Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Stakeholder Collaborative Governance (studi kasus di kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara)	Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.	Bentuk <i>Collaborative Governance</i> dalam penelitian ini adalah lebih kedalam bentuk kolaborasi yang terjalin antar stakeholder dalam upaya menjaga dan melindungi daerah perbatasan, khususnya di daerah Nunukan, Kalimantan dengan cara melibatkan stakeholder seperti kementrian, TNI/Polri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat selain itu keterlibatan lembaga non pemerintah seperti masyarakat, LSM dan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan bersama untuk menjaga keutuhan NKRI di daerah perbatasan.
12	Eki Darmawati	Collaborative Governance dalam Perencanaan	Penelitian Kualitatif	Faktor ketidak sempurnaan <i>collaborative governance</i> dalam penelitian ini Hal ini di latar belakang atas dasar kurang terbukanya ruang aspirasi

	dan Nazaki (2015)	Pembangunan: Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Agenda Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015	(Wawancara, Observasi dan Dokumentasi)	masyarakat dan kurang terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah kepulauan Riau, sehingga pelaksanaan pembangunan sering kali tidak tepat sasaran dan kurang efektif dilakukan.
--	-------------------	--	--	--

***Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.**

<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
13	Nur Hayati & Suparjan (2017)	Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program CSR Batik Cap Pewarna Alami PT. Semen Gresik Pabrik Tuban	Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.	Dalam penelitian ini sasaran atau target <i>collaborative governance</i> yang akan terjalin adalah kerjasama antara pihak PT. Semen Gresik dengan masyarakat daerah tuban lewat lembaga swadaya masyarakat yaitu (KPR) atau Koalisi Perempuan Ronggolawe untuk mencari 20 orang yang akan dilakukan pembinaan dan pelatihan pembuatan batik. terutama pada kalangan masyarakat yang diuntungkan karena dapat menambah ilmu atau wawasan serta keterampilan dalam proses pembuatan batik cap pewarna alami sehingga kedepannya dapat menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik di daerah tuban.

14	Hari Rujito (2016)	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Modal Ekonomi Desa Konservasi dan Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri	Penelitian Kuantitatif (Wawancara dan kuisisioner)	Dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa aspek terpenting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kawasan TNTB dihasilkan urutan sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan masyarakat 24%, 2) pelibatan masyarakat ke dalam rehabilitas kawasan 21%, 3) pengembangan usaha milik masyarakat 20%, 4) kekuatan program pendampingan 20%, 5) peningkatan kapasitas masyarakat 19%. Sehingga dari data diatas dapat disimpulkan untuk pemberdayaan masyarakat di kabawasn TNTB sudah berjalan secara baik dengan dibuktikan dengan beberapa indikator peran masyarakat dalam segala betuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan desa konservasi dan ekowisata kawasan Taman Nasinal Meru Betirin.
----	--------------------	--	--	---

***Collaborative Governance* dalam perpektif Kesehatan**

NO	Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
15	Muhamma d Muqorobin	Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan	Hubungan <i>collaborative governance</i> pada penelitia ini belum efektif dilakukan karena beberapa faktor utama yaitu antara komunikasi yang belum tercipta sepenuhnya antara <i>stakeholders</i> terkait dalam pengendalian

	Ist (2016)	Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Belitar	Dokumentasi)	penyakit TB-HIV di kota belitar, penyelesaian masalah dan pemberian solusi atas penanganan TB-HIV yang masih belum sempurna dilakukan, dan indikator dampak sementara atas hasil penyelesaian masalah yang masih belum dapat dipastikan hasilnya karena masih belum terjalannya secara sempurna peran antar stakeholder yang terlibat.
<b><i>Collaborative Governance</i> perspektif Pendidikan</b>				
<b>NO</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
16	T. Anisa Putri (2017)	Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan Dokumentasi.	<i>Collaborative Governance</i> dalam penelitian ini muncul atas dasar penyelenggaraan pendidikan khusus di provinsi Riau, bentuk kolaborasi yang dilakukan pada penelitian ini menitik beratkan kepada sejauh mana peran pemerintah provinsi Riau dan masyarakat dalam mendampingi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Faktor <i>collaborative governance</i> yang terjadi adalah belum adanya wujud kegiatan bersama antara pemerintah dengan stakeholder yang ada dalam penanganan pendidikan khusus di Provinsi Riau yang di selenggarakan bersama.

***Collaborative Governance* dalam pengendalian kebijakan**

NO	Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
17	Juhari (2016)	Manajemen Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Collaborative Governance (studi tentang manajemen kebijakan APBD tahun anggaran 2015 di kota Malang)	Penelitian Kualitatif (Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan FGD)	<i>collaborative governance</i> dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan APBD tahun anggaran 2015 di kota malang dapat diukur melalui pelaksanaan kebijakan yang masih sering sekali tidak melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengambilan keputusan tertinggi dalam forum rancangan APBD, sehingga sering kali program-program kebijakan yang dirancang tidak tepat sasaran dan pemanfaatanya bagi masyarakat secara umum.
18	Maulana Mukhlis (2017)	Analisis Kritis Atas Motif <i>Policy Community</i> dalam Kolaborasi (studi kasus kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung)	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan Dokumentasi)	Penelitian yang dilakukan Maulana Mukhlis ini membahas tentang bentuk <i>collaborative governance</i> yang dilakukan adalah pada pola hubungan antara pemerintah provinsi dengan masyarakat dan antara pemerintah dengan <i>policy community</i> dalam upaya kolaborasi pemindahan pusat pemerintahan provinsi Lampung. Dalam penelitian tersebut di jelaskan secara ringkat tentang peran pemerintah, stakeholder dan masyarakat berjalan secara baik, karena selama kepentingan stakeholder dan

				masyarakat dalam pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan provinsi yang nantinya dapat memenuhi kepentingan maka hubungan tersebut akan selalu berjalan secara baik.
19	Desni Azlin (2018)	Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016	Penelitian Kualitatif (Wawancara dan Diskusi Kelompok)	Bentuk <i>collaborative governance</i> yang terjadi pada penelitian ini adalah tentang tidak terjalinnya hubungan sinergisitas atas pemerintah Desa Bandur Picak dengan lembaga adat yang ada di desa tersebut, sehingga sering sekali terjadi miass komunikasi dan kesalah pahaman dalam penetapan kebijakan maupun kepercayaan antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam upaya melestarikan kearifan lokal desa Bandura Picak, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
20	Junaidi (2016)	Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang	Jenis penelitian kualitatif (Wawancara dan Dokumentasi)	Krisis listrik di kota Tanjung Pinang menjadi tolak ukur kegiatan <i>collaborative governance</i> antara pemerintah kabupaten, DPRD kota dan masyarakat yang diwakili lembaga swadaya masyarakat (LSM) kota Tanjung Pinang dalam upaya penyelesaian masalah krisis listrik yang bermula dari kurangnya pasokan listrik ke Kota Tanjung Pinang dari PLN pusat ke PLN cabag kota Tanjung Pinang dengan dilakukannya lobi dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi dalam upaya penambahan arus listrik yang masuk ke Kota Tanjung Pinang.

Yang berbeda dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah jika pada beberapa penelitian sebelumnya, bentuk *collaborasi governance* yang terjalin adalah antara pihak masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan pihak non-pemerintah (swasta) dan pemerintah dengan pihak non pemerintah (swasta) dengan melibatkan peran masyarakat sebagai aktor utama. Peneliti akan mencoba untuk mengurai secara singkat dan padat tentang bentuk pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *collaborative governance* yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan Pemerintah Desa Hargomulyo dengan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan aktor swasta yang terlibat dalam upaya pembudidayaan ikan. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana peran masing-masing *stakeholder* dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor kolaborasi.

## **I.6 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menguraikan bentuk *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat antara Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah desa Hargomulyo yang kemudian akan di jelaskan menjadi 2 bentuk teori utama dalam penyelesaian penelitian ini, teori-teori tersebut antara lain, teori tentang *Collaborative Governance* dan teori tentang Pemberdayaan Masyarakat.

### **I.6.1 Collaborative Governance**

Pola kepemimpinan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu tujuan dari banyak negara yang ada di dunia saat ini. Dalam upaya mewujudkan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik atau *good governance* ada tiga aspek yang harus bisa berjalan secara beriringan yaitu *State* (negara atau pemerintah) yang berfungsi untuk menciptakan sebuah lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* (sektor swasta) memiliki tujuan untuk menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan, *civil society* (masyarakat sipil) berperan positif dalam kegiatan interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. (sedarmayanti, 2012)

Selama beberapa waktu terakhir mulai sering kita mendengar sebuah strategi dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan yang dimana pemerintahan dianggap dapat dilaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien serta lebih cepat untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi ini kemudian dikenal dengan istilah *Collaborative Governance* “pemerintahan Kolaboratif”. Pada pemerintahan kolaboratif pemerintah tetap memainkan peranannya sebagai fasilitator mengajak seluruh elemen untuk berperan secara

aktif dalam membuat dan merumuskan kebijakan berkaitan dengan kepentingan bersama dalam sebuah forum atau kegiatan tertentu.

Dalam sebuah kepemimpinan, pemerintah tidak hanya mengandalkan kepada kapasitas internal yang dimiliki dalam upaya penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program suatu kegiatan. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan juga menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan atau program yang kemudian memberikan dorongan kepada pemerintah untuk mau melakukan kerjasama beberapa pihak atau banyak pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil untuk dapat terjalannya kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau sebuah kebijakan. (Purwanti, 2016)

#### **1.6.1.1 Pengertian *Collaborative Governance*.**

*Collaborative Governance* adalah cara pengelolaan pemerintah yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar negara, berorientasi pada consensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang memiliki tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik. Komponen proses kolaborasi terdiri dari dialog, membangun kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama antar lembaga terkait. (Ansell & Gash, 2007) . Dengan kata lain *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash menunjukkan hubungan langsung

atau tidak langsung antara pemerintah dengan lembaga diluar pemerintahan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang dapat dilaksanakan secara bersama demi kepentingan publik.

Asell and Gash juga mengungkapkan bahwa *collaborative Governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods (collaborative governance* merupakan suatu tipe pemerintahan yang dimana aktor publik dan private bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan kebijakan publik yang baik). (Ansell & Gash, 2007)

Menurut Fendt, ada tiga alasan utama kenapa sebuah organisasi memutuskan untuk melakukan sebuah kolaborasi, yaitu antara lain :

- a. Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa adanya bantuan dari pihak kedua atau pihak lain.
- b. Dengan kolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh sebuah organisasi akan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.

- c. Dengan adanya kegiatan kolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar. (Fendt, 2010)

Menurut Tang and Masmanian (2008) dalam penelitian Ratna Trisuma Dewi, juga mengungkapkan bahwa *Collaborative Governance a concept that describes the process of establishing, steering, facilitating, operating and monitoring cross sectoral organizational arrangement to address public policy problems that cannot be easily addressed by a single organization by joint efforts, reciprocal expectations and voluntary participation among formally autonomous entities, from two or more sectors public, for-profit and non-profit in order to leverage build on the unique attributes and resources of each.* ( *Collaborative Governance* merupakan sebuah konsep yang mendeskripsikan proses membangun, mengemudi, memfasilitasi, mengoperasikan dan memonitor pengaturan organisasi lintas sektoral untuk menangani masalah kebijakan publik yang tidak dapat dengan mudah untuk ditangani oleh satu organisasi untuk sektor publik sendiri. Pengaturan ini ditandai dengan upaya bergabung , harapan timbal balik, dan partisipasi sukarela antar etintas otonom resmi dari dua atau lebih sektor publik, profit dan non-profit dalam rangka meningkatkan atau membangun atribut unik dan sumberdaya dari masing-masing). (Dewi, 2012)

Menurut Dwiyanto dalam penelitian yang dilakukan oleh sulaksono, mengatakan bahwa *Collaborative Governance* praktek manajemen yang menghargai keragaman nilai, tradisi dan budaya organisasi, kerja dalam struktur yang relative longgar dan berbasis pada jaringan, dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan tujuan bersama serta memiliki kapasitas mengelola konflik. (sulaksono, Suswanta, & Efendi, 2017)

#### **1.6.1.2 Kriteria *Collaborative Governance***

Menurut Asel dan Gash dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat 6 kriteria terpenting untuk dapat mendefinisikan *Collaborative Governance* yaitu:

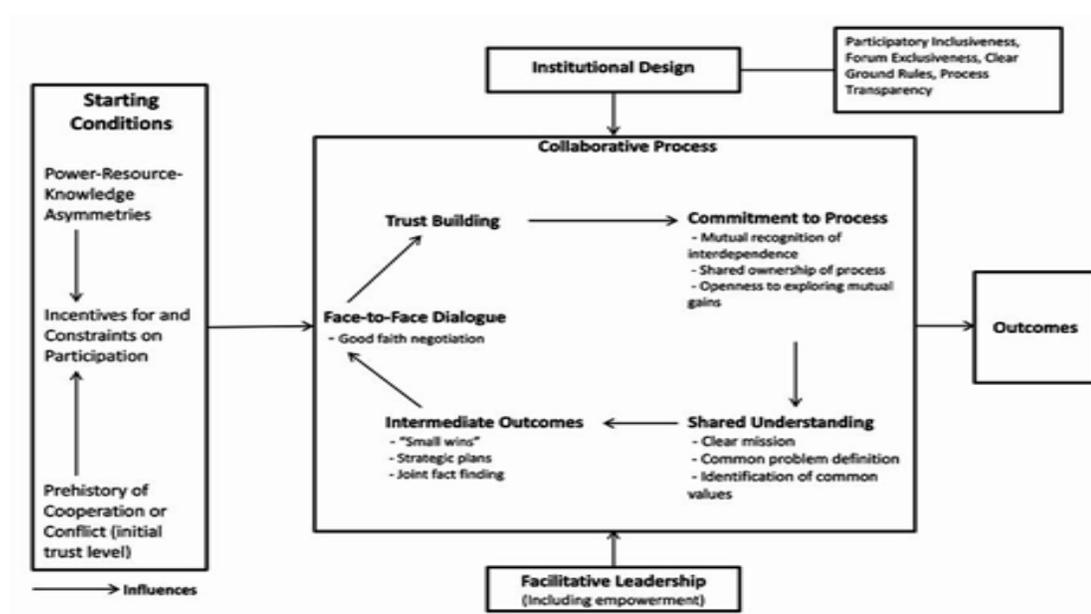
1. Forum di inisiasi oleh badan publik
2. peserta forum termasuk organisasi non pemerintah
3. peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperasn konsultasi saja.
4. Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama.
5. Forum tersebut bertujuan untuk mencari mufakat dan kebijakan (walaupun dalam prakteknya mufakat tidak akan selalu dilakukan)
6. Focus dari kolaborasi adalah kebijakan publik dan pengelolaan publik. (Ansell & Gash, 2007)

### 1.6.1.3 Model Collaborative Governance

Berikut adalah bentuk *Collaborative Governance* yang di contohkan oleh Ansel dan Gash yang di kutip dari penelitian yang dilakukan oleh probowati (2018) untuk menjelaskan secara singkat tahapan proses *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash, sebagai berikut :

**Bagan 1.1**

Model *Collaborative Governance* menurut Ansel dan Gash (2007)



Sumber: diambil dari penelitiannya (Probowati, 2018)

Model *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash dalam penelitian probowati tersebut terdiri atas beberapa tahapan proses yang harus dilakukan oleh

ketiga stakeholder untuk dapat menciptakan sebuah kolaborasi yang dapat dilaksanakan secara maksimal, tahapan dan proses tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap ini akan dijelaskan kondisi dimana terjadinya proses ketidakseimbangan antar aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan *collaborative governance* yang memiliki perbedaan kepentingan, akan tetapi dibenturkan dengan dorongan-dorongan serta tuntutan keadaan aktor-aktor kolaborasi untuk harus melakukan kerjasama karena adanya latar belakang sejarah konflik yang sama *stakeholder*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, Ansel dan Gash juga membagi kondisi awal menjadi tiga variable utama yang antara lain sebagai berikut :

##### a. Ketidakseimbangan sumber daya dan kekuatan

Ketidakseimbangan sumber daya muncul atas dasar ketidakmampuan kapasitas organisasi atau sumber daya untuk berpartisipasi dan bersaing dengan stakeholder yang lainnya. Ketidakmampuan tersebut akan memunculkan kondisi yang lebih negatif apabila aktor penting tidak memiliki infrastruktur pendukung organisasi yang representatif untuk menjalankan *collaborative governance*. Relasi antar stakeholder tersebut akan dapat dilakukan secara efektif dan

efisien ketika masing-masing aktor memiliki komitmen untuk melakukan pemberdayaan dan representasi dalam melakukan kolaborasi.

b. Dorongan-dorongan untuk berpartisipasi

Ketidak seimbangan antar *stakeholder* akan berdampak pada eksklusifitas antar aktor sehingga akan mempengaruhi komitmen dan dorongan untuk berpartisipasi. Terdapat dua tambahan model relasi kontingensi ini, *pertama*, apabila terdapat tempat alternatif dimana aktor-aktor mampu mendapatkan tujuannya secara sepihak, maka *collaborative governance* hanya akan bekerja jika aktor-aktor melihat diri mereka sangat membutuhkan hubungan interdependensi. *Kedua*, apabila interdependensi bersifat kondisional atau sesuai dengan kondisi *stakeholder* atas forum kolaborasi yang dilakukan, maka sponsor-sponsor harus melakukan pekerjaan lebih dalam mendapatkan forum-forum alternatif untuk menghormati dan menghargai hasil dari proses kolaborasi.

c. *Pre-History* (pra-sejarah)

Ketika masing-masing *stakeholder* memiliki kapasitas relasi yang tinggi maka akan memunculkan intensitas konflik yang tinggi serta mampu menciptakan dorongan yang kuat untuk melakukan

kolaborasi. Konflik merupakan sebuah bentuk indikasi bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki kesadaran dan komitmen dalam melakukan kolaborasi. Selain itu komitmen harus dibarengi dengan sifat-sifat saling percaya dan independensi sehingga konflik akan menghasilkan sifat konstruktif yang akan menguatkan komitmen kolaboratif antar *stakeholder*.

## 2. *Fasilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan menjadi aspek terpenting dalam sebuah pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Kepemimpinan merupakan unsur utama dan memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan peraturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog dan menganalisis kepentingan bersama. Ansel dan Gash dalam penelitian yang dilakukan oleh Harmawan juga mengidentifikasi tiga komponen penting dalam kepemimpinan kolaboratif yang efektif, antara lain :

- a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaboratif
- b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis.
- c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Sebuah kepemimpinan tidak akan berjalan secara baik maupun efektif untuk dilakukan didalam sebuah organisasi, apabila tidak bertindak secara tegas dan adil. Dalam kegiatan kolaboratif aktor-aktor yang berperan dalam

kegiatan kolaboratif dituntut untuk bersifat simetris atau sejalan antara pemerintah, swasta dan masyarakat agar dapat terbentuknya sebuah kepemimpinan yang organik dan bentuk kepemimpinan organik tersebut dapat di ciptakan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan atau keadaan lokal.

### 3. *Institutional Design* (Disain Institusional)

Ansel dan Gash dalam penelitian yang dilakukan oleh hermawan juga mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu kepada protocol dasar atau aturan-aturan dasar untuk melakukan kolaborasi secara kritis, dalam hal ini yang paling ditekankan dalam desain institusional adalah pada legitimasi procedural dalam proses kolaborasi antar *stakeholder*. Dalam hal ini pemerintah dituntut harus bersifat terbukadan inklusif. Keterbukaan pemerintah dalam proses kolaborasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar *stakeholder* agar para aktor merasa dilibatkan dalam kegiatan partisipasi aktif dalam pengembangan komitmen dalam sebuah proses yang terjadi.

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada kesempatan bagi setiap aktor untuk melakukan komunikasi dengan *stakeholder* yang lainnya tentang hasil-hasil dari kebijakan dan klaim bahwa hasil kebijakan merupakan hasil konsesus yang dilakukan oleh seluruh aktor. Dalam ini pemerintah harus melakukan tindakan tegas apabila terdapat aktor yang terlibat dengan isu yang diwacanakan akan tetapi aktor tersebut tidak

memiliki keteresuaian, maka pemerintah harus mengambil tindakan untuk bersikap eksklusif tanpa harus ada ketrlibatan aktor lain secara inklusif. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kolaborasi tersebut di jalankan.

#### 4. *Collaborative Proses* (Proses Kolaborasi)

Model proses kolaborasi menggambarkan bentuk kolaborasi yang dilakukan sebagai perkembangan tahapan dasar atas penentuan masalah, penentu tujuan dan implementasi atas kegiatan kolaborasi yang dilakukan. Kolaborasi juga sering kali di pandang sebagai acuan pada tujuan yang ideal seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, saling memahami, dan hasil yang didapat. Meskipun dalam proses kolaborasi sering sekali terjadi ketidaksesuaian atau ketidak teraturan antar *stakeholder* akan tetapi komunikasi adalah tiang utama dari kolaborasi sehingga kita dapat memulai analisa dari dialog yang dilakukan secara langsung.

##### a. Dialog tatap muka (*Face to Face*)

seluruh *collaborative governance* tercipta dari proses dialog tatap muka antar aktor kolaboratif. Proses yang berorientasi kepada konsensus memunculkan kesempatan bagi setiap aktor untuk melaakukan identifikasi peluang-peluang keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor untuk menciptakan kepercayaan dan mencegah eksplorasi keuntungan keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi.

Dialog tatap muka merupakan proses membangun kepercayaan, sikap saling percaya, sikap menghormati, sikap saling memahami dan komitmen dalam berproses.

b. Membangun kepercayaan (*Trust building*)

Proses kolaborasi adalah proses dimana membangun kepercayaan antar aktor kolaboratif adalah hal utama yang harus dilakukan oleh setiap *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi. Dalam beberapa penelitian proses kolaborasi tidak hanya berfokus kepada proses negosiasi saja, akan tetapi membangun kepercayaan antar aktor. Membangun kepercayaan antar *stakeholder* merupakan proses untuk saling memahami komitmen dalam menjalankan kolaborasi.

c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)

Komitmen terhadap proses dapat diartikan mengembangkan keyakinan bahwa perundingan perundingan dengan tujuan yang baik untuk kepentingan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen terpenting dalam kolaborasi. Komitmen terhadap proses memiliki arti dan tujuan yang sangat penting dalam tercapainya tujuan dari *collaborative governance*. Komitmen bergantung kepada kepercayaan para aktor yang lain dalam

menghormati kepercayaan dan perspektif *stakeholder* dalam kolaborasi.

Rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses kolaborasi. Kepercayaan juga memiliki peranan dalam menjamin bahwa masing-masing aktor memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses kolaborasi. Adanya rasa kepercayaan dan kepemilikan terhadap proses juga selain menumbuhkan rasa tanggung jawab juga akan mendorong terciptanya bentuk kolaborasi yang dilakukan antar aktor semakin kuat dan menjalin rasa kekeluargaan serta saling memiliki antar *stakeholder* dalam kegiatan kolaborasi yang dilakukan.

d. Saling memahami (*share understanding*)

Dalam kegiatan-kegiatan kolaborasi, aktor harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap tujuan yang ingin dicapai bersama. Saling memahami dalam beberapa juga dapat diartikan sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideology bersama, tujuan yang jelas, arah yang strategis dan keselarasan nilai.

e. Hasil sementara (*Intermediate outcomes*)

Kolaboratif secara relative dapat diartikan konkrit ketika ditemukanya kemungkinan keberhasilan yang didapat dari kegiatan kolaborasi. Meskipun dalam hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata, akan tetapi proses outcomes tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses.dan yang harus dipahami meskipun dalam proses ini akan menuntun sebagai tujuan tercapainya keberhasilan kolaborasi, akan tetapi proses *intermediate outcomes* tidak dapat digeneralisasi sebagai hasil akhir yang di capai. (Hermawan, 2016)

#### **1.6.1.4 Indikator Keberhasilan *Collaborative Governance***

Menurut DeSave dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyo *Collaborative governance* dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator tersebut antara lain : a) *Network Structure* (struktur jaringan); b) *commitment to commo purpose* (komitmen terhadap tujuan umum); c) *trust among the participants* (kepercayaan para stakeholder); d) *aces to uthority* (akses terhadap wewenang); e) *distributive accountability/responsibility* (pembagian pertanggungjawaban); f) *information sharing* (penyebarluasan informasi); g) *aces to resourcces* (akses terhadap sumber daya). (Nurcahyono, 2015)

## **I.6.2 Teori *Stakeholder***

*Stakeholder* atau yang sering sekali kita pahami sebagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan kolaborasi atau kerjasama yang berada di dalam maupun berada diluar perusahaan atau kegiatan kolaborasi yang memiliki kepentingan dan peran dalam menentukan tingkat keberhasilan berjalannya suatu kegiatan kolaborasi yang dilakukan. Menurut Munawaroh (2016) menjelaskan bahwa *stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, yaitu kata *stake* dan *holder*. secara umum konsep *stakeholder* dapat diartikan sebagai sebuah konsep kepentingan atau aktor yang memiliki kepentingan. Sedangkan dalam arti dalam garis besar konsep *stakeholder* dapat diartikan sebagai individu atau sebuah organisasi yang memiliki kepentingan dengan sebuah kelompok perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi pencapaian perusahaan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung oleh pihak didalam perusahaan maupun pihak diluar perusahaan. Selain itu Munawaroh (2016) juga menjelaskan bahwa konsep *stakeholder* dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu *internal stakeholder* yang berupa sekelompok atau individu yang terlibat didalam sebuah lingkungan organisasi yang bertanggung jawab penuh akan kegiatan yang dilakukan. dan yang kedua adalah *eksternal stakeholder* yaitu sekelompok individu yang bukan bagian suatu organisasi akan tetapi memiliki pengaruh dalam sebuah organisasi. (Munawaroh, 2016)

Sedangkan menurut Freedman dalam Saharudin (2013) menjelaskan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Selain itu, Budimanta dkk dalam Saharudin (2013) juga menjelaskan bahwa *stakeholder* diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan yang mewakili sebuah kelompok kepentingan jika dalam sebuah kelompok tersebut memiliki kekuasaan, kepentingan atau legitimasi terhadap program. (Saharuddin & Siska , 2016)

Sedangkan menurut Reed dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana (2012) mengartikan dan menganalisis pemangku kepentingan itu dapat dilakukan dengan 3 hal sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kepentingan dan pemangku kepentingannya;
2. Mengelompokkan dan mengatagorikan kelompok kepentingan;
3. meneliti hubungan antar kelompok kepentingan. (Roslinda, 2012)

Dari pemahaman beberapa teori diatas, dapat diartikan bahwa pengertian *stakeholder* merupakan sekelompok orang atau individu yang berasal dari internal atau eksternal organisasi dalam upaya memberikan pengaruh atau memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakuka oleh sebuah perusahaan atau organisasi, untuk mencapai tujuan

bersama dalam menentukan kepentingan, legitimasi dan kekuasaan dalam sebuah kegiatan perusahaan atau organisasi.

## **I.7 Definisi Konseptual**

### **I.7.1 Collaborative Governance**

*Collaborative governance* adalah sebuah model kerjasama atau kolaborasi yang dibangun antara lembaga publik (pemerintah) dengan lembaga non-publik (non- pemerintah) secara langsung untuk terlibat dalam proses perumusan dan penetapan sebuah kebijakan yang kolektif dalam penerapan kebijakan publik, pengelolaan publik atau asset yang dimana antara pemerintah dengan aktor non-pemerintah sama-sama menguntungkan dan diuntungkan dalam pelaksanaan yang dilakukan.

### **I.7.2 Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* merupakan sekelompok orang atau individu yang berasal dari internal atau eksternal organisasi dalam upaya memberikan pengaruh atau memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakuka oleh sebuah perusahaan atau organisasi, untuk mencapai tujuan bersama dalam menentukan kepentingan, legitimasi dan kekuasaan dalam sebuah kegiatan perusahaan atau organisasi.

## I.8 Definisi Oprasional

Definisi oprasional yang digunakan untuk melihat bentuk *collaborative governance* yang terjalin antara masing-masing *stakeholder* yaitu antara lain :

NO	Variabel	Indikator	Parameter
1	<i>Stakeholder</i>	Mengetahui dan Mengidentifikasi kepentingan dan pemangku kepentingannya	1. Mengetahui keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam kegiatan pemberdayana masyarakat. 2. Mengidentifikasi kepentingan <i>stakeholder</i> yang terlibat.
		Mengelompokkan dan mengatagorikan kelompok kepentingan	Mengelompokkan peran masing-masing <i>stakeholder</i> yang terlibat.
		Meneliti hubungan antar kelompok kepentingan	Mengetahui hubungan yang terjadi antara masing-masing <i>stakeholder</i>

2	<b><i>Collaborative Governance</i></b>	<i>Starting Condition</i> (Kondisi Awal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dorongan untuk melakukan inovasi dengan wujud kolaborasi.</li> <li>2. Mengetahui ketidak seimbangan sumber daya antar <i>stakeholder</i> yang terlibat.</li> <li>3. Mengetahui sejarah konflik masing-masing aktor kolaborasi.</li> </ol>
		<i>Facilitative Leadership</i> (Kepemimpinan Fasilitatif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bentuk manajemen kegiatan masing-masing aktor kolaborasi.</li> <li>2. Mampu mengelola dan melaksanakan kredibilitas teknis masing-masing stakeholder.</li> <li>3. Mengetahui keterlibatan masing-masing aktor dalam pembuatan kebijakan atau keputusan yang kredibel.</li> </ol>
		<i>Institutional Design</i> (Disain)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui bentuk komunikasi</li> </ol>

		<p>Institusional)</p>	<p>yang digunakan setiap aktor kolaborasi dalam setiap pengambilan kebijakan.</p> <p>2. Untuk mengetahui hasil dari sebuah kebijakan merupakan hasil dari konsensus yang melibatkan seluruh aktor kolaborasi.</p>
		<p><i>Collaborative Process</i> (Proses Kolaborasi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dialog Tatap Muka (Face to Face)</li> <li>2. Membangun kepercayaan (Trust Building)</li> <li>3. Komitmen terhadap proses (Commitment to Process)</li> <li>4. Sikap saling memahami (Share Understanding)</li> <li>5. Hasil sementara (Intermediate Outcome)</li> </ol>

## **I. 9 Metode Penelitian**

### **I.9.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan data deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika Ilmiah. (Azwar, 1998)

Metode penelitian Kualitatif juga sering diartikan sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian pada bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2014).

Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan terhadap masyarakat dan juga pemerintahan akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta swasta dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat khususnya dalam bidang usaha kelompok atau individu.

## **I.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. Hal yang menarik pada kelompok ikan ini dibandingkan dengan kelompok budidaya yang lainnya adalah terdapat pada prestasi kelompok budidaya ikan ini yang memang sudah menginjak ranah juara 1 nasional selain itu dalam proses pembudidayaan yang dilakukan adanya wujud kolaborasi atau kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Desa Hargomulyo dengan Kelompok Pembudidayaan Ikan Mina Bayu Lestari tersebut secara berkelanjutan. Dalam proses pencarian data peneliti akan mencari informasi secara langsung kepada lembaga-lembaga atau kelompok terkait antara lain kepada **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Pengepul Hasil Produksi (*Private Sector*) dan Kelompok Pembudidayaan Ikan Gurame**. Hal ini dilakukan selain untuk mendapatkan informasi secara akurat karena dari sumber-sumber yang terpercaya, wawancara secara langsung ini juga dilakukan untuk mencari informasi tentang bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam perspektif *collaborative governance*

### **I.9.3 Unit Analisis Data.**

Sesuai dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi tersebut, maka dari itu peneliti akan mencoba untuk menggali informasi dan menganalisis data-data yang didapatkan dari beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan *collaborative governance* dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo dan Kelompok Ikan Mina Bayu Lestari dalam perspektif *collaborative governance* sehingga pada penelitian ini akan mencari data outentik dari berbagai sumber terkait seperti : **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Pengepul Hasil Produksi (*Private sector*) dan Kelompok Pembudidayaan Ikan Gurame Mina Bayu Lestari.**

### **I.9.4 Jenis Data.**

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber secara langsung untuk tujuan khusus, seperti data-data yang di dapat dari informan melalui teknik wawancara dan observasi. Sehingga dalam penelitian ini yang dijadikan data primer dalam proses penelitian adalah hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kulon Progo (Bidang Pembudidayaan Ikan) dengan Kelompok Ikan Mino Bayu Lestari dan pihak pemerintah Desa Hargomulyo.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik atau metode pengumpulan data yang didapat atau diperoleh dari hasil dokumentasi atau studi literature atau studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang dimaksud dari studi literature atau studi pustaka adalah bentuk pengumpulan data-data yang didapat dari hasil pengamatan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan tersebut. Seperti halnya di dapat dari Buku, Jurnal, Artikel, Skripsi, Tesis, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **I.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencari, mendapatkan dan memperoleh data dari hasil penelitian yang dilakukan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian. Dalam proses penelitian ini, peneliti mencoba untuk mencari dan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan olah data melalui dokumentasi secara langsung kepada objek penelitian.

#### a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang digunakan untuk menentukan hasil data yang diambil dalam proses penelitian. Dengan menggunakan wawancara data yang akan diperoleh akan lebih

mendalam dan lebih akurat, hal ini bisa terjadi karena metode wawancara ini dilakukan menggunakan metode tatap muka antara narasumber atau responden dengan peneliti dengan berbagai model tanya jawab atau interaksi langsung.

Metode wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Salim (2006) Dalam segi wawancara terstruktur metode ini dapat dibedakan mejadi 4 model yaitu antara lain:

1. Wawancara alamiah-informal yang dimana periset dapat mengembangkan secara spontan selama terjadi interaksi percakapan dengan responden.

2. Wawancara dengan pedoman umum dimana periset hanya menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan;

3. Wawancara dengan pedoman terstandar terbuka yang dimana metode ini digunakan wawancara yang melibatkan banyak pengumpulan data.

4. Wawancara tidak langsung yang dimana periset meminta bantuan kepada beberapa pengambil data

(*enumerator*), karena riset membutuhkan banyak data. (Salim, 2006)

Pada tahap wawancara peneliti akan mencoba untuk mewawancarai aktor-aktor dalam proses kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo lewat Bidang Pembudidayaan Ikan dan untuk kelompok masyarakat peneliti akan mewawancara Ketua atau Penanggungjawab Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari serta untuk Pemerintah Desa Hargomulyo, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala Desa Hargomulyo selaku pimpinan pada tingkat Desa. sedangkan untuk *private sector* peneliti akan mencoba mencari informasi keterlibatannya lewat wawancara kepada masyarakat terkait penjualan hasil produksi ikan.

b. Metode Observasi.

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja pancaindra lainnya. Observasi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata yang dibantu oleh panca indra lainnya. (Bugin, 2011). Observasi atau pengamatan diartikan sebagai

pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indra pengelihatannya yang berarti tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini dapat diartikan bahwa metode observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh manusia untuk melihat dan merasakan keadaan atau fenomena yang ada dan dapat dijadikan sebagai obyek penelitian. (sueharto, 2008)

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa Observasi merupakan sebuah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2014)

Dalam menggunakan metode observasi peneliti juga harus memperhatikan aspek-aspek khusus antara lain adalah peneliti harus mengetahui dulu terkait penelitian yang akan diteliti, peneliti harus bisa mencatat hal-hal penting terkait penelitian, peneliti harus memiliki alat-alat bantu pengamatan untuk menunjang pengamatan dan peneliti juga harus bisa mengatur jarak antara obyek penelitian dengan peneliti agar

tetap aman dalam proses penelitian. Dalam proses observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk melakukan observasi secara mendalam terkait masing-masing peran *stakeholder* dalam proses *collaborative governance* antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Pengepul hasil produksi (*private sector*) dan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan dalam melakukan pembudidayaan ikan gurame di Desa Hargomulyo.

c. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi merupakan metode yang didapat dari hasil catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sekelompok orang atau organisasi tertentu sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya dari dokumen catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, candi, arca dan lain-lain. Metode dokumentasi juga sering

disebut sebagai metode penyempurna dari metode sebelumnya yaitu metode wawancara dan metode observasi. (Sugiyono, 2014)

Dalam proses pencarian data-data untuk memperkuat penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk melengkapi data-data penelitian dengan hasil dari dokumentasi-dokumentasi yang dilakukan dalam memperkuat dan meneliti terkait peran maupun bentuk *collaborative governance* antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Pengepul hasil produksi ikan (*private sector*) dan Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dalam melakukan pembudidayaan ikan gurame dengan memberdayakan kelompok masyarakat desa.

#### **I.9.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan teknik untuk menganalisis data sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007: 98). Selain itu ada beberapa proses-proses analisis dalam penelitian kualitatif yang pertama yaitu reduksi data yang dimana periset akan melakukan proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh lapangan. Kemudian yang kedua, melakukan penyajian data yang dimana periset akan mendeskripsikan kumpulan dari informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Dan proses ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dimana periset akan melakukan makna dari setiap gejala yang akan diperoleh dan menarik sebuah kesimpulan. (Maleong, 2007)

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mencoba untuk melakukan metode analisis data yang peneliti dapat dari hasil kegiatan pengumpulan data yang dilakukan sebelumnya yaitu menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa *stakeholder* terkait dalam penelitian ini, data-data tersebut akan di ambil dari proses wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan peneliti kepada *stakeholder* yang terkait dalam proses pemberdayaan seperti Dinas Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Hargomulyo, Pengumpul hasil produksi (*private sector*) dengan Kelompok Pembudidayaan Ikan Mina Bayu Lestari sebagai sasaran atau target penelitian yang di inginkan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat dan obyektif yang akan di analisis dan dijadikan acuan utama penelitian.